

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin besar sebuah instansi, maka semakin sulit bagi pemilik kebijakan untuk mengawasi ada/tidaknya kecurangan yang terjadi di instansi tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan fasilitas untuk siapapun yang ingin mengungkap kecurangan tersebut. Kecurangan yang terjadipun bermacam-macam bentuknya, tindak kecurangan tersebut dapat dikategorikan dalam kategori tindak pidana korupsi (tipikor) maupun tidak. Beberapa kecurangan yang tidak termasuk dalam kategori Tipikor diantaranya adalah penyalahgunaan aset, penyimpangan atas aset, pernyataan palsu, dan lain lain [1]. Untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur membuat sebuah Whistleblowing system.

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran. Laporan diperoleh dari whistleblower perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia.

Dalam tata kelola organisasi pemerintah, whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi

yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Ruang lingkup pelaporan pelanggaran termasuk Pengaduan / Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis / tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan / atau peraturan di KOMINFO Jatim, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil, yang meliputi beberapa hal diantaranya penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku, pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, Gratifikasi atau Tindakan Penyipuan.

Perancangan dilakukan pada tahap awal pembuatan aplikasi untuk mengetahui kebutuhan akan spesifikasi aplikasi yang akan dibuat. Maka dari itu kelompok kami membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) beserta dengan skenario uji coba yang akan dicobakan pada aplikasi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam praktik kerja lapangan ini, maka didapatkan suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Rancangan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak pada Studi Kasus *Whistleblowing System* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur”.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, dalam praktik kerja lapangan ini terdapat batasan-batasan masalah, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya sampai tahap perancangan,
2. Whistleblowing System yang dirancang ini meliputi aduan, proses, dan tanggapan aduan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dan

3. Skenario testing yang dibuat menggunakan jenis pengujian blackbox.

#### **1.4 Tujuan**

Didapati tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk membuat dokumen spesifikasi yang digunakan sebagai manual referensi bagi tim perancang antarmuka, pemrogram yang menulis kode, dan penguji yang melakukan verifikasi kinerja perangkat lunak yang dibuat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

#### **1.5 Manfaat**

Berdasarkan dokumen yang dibuat terdapat beberapa manfaat yang didapatkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membuat dokumen perencanaan proyek sehingga mendapatkan deskripsi umum serta rancangan awal fungsi, batasan, serta rencana anggaran pembuatan program.
2. Membuat spesifikasi kebutuhan sistem untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non fungsional pada program
3. Membuat rancangan arsitektur dan rancangan antarmuka sistem untuk mengetahui bagaimana operasi dapat berjalan dalam aplikasi.
4. Membuat rancangan sistem aplikasi terutama pada perancangan data sehingga dapat mengetahui algoritma yang digunakan dalam aplikasi
5. Membuat skenario uji coba aplikasi sebagai bahan evaluasi dan verifikasi terkait fungsi sistem

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam laporan praktik kerja lapangan ini, pembahasan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan praktik kerja lapangan ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang pengertian kebutuhan fungsional dan non fungsional, use case diagram, sequence diagram, flowchart, desain antarmuka aplikasi, perancangan komponen, dan skenario testing aplikasi.

### **BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berisi tentang gambaran umum organisasi yang menjadi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan, sejarah, struktur organisasi, visi, dan misi perusahaan.

### **BAB IV METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian seperti : observasi, analisa kebutuhan, perancangan sistem, dan perancangan skenario testing.

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan hasil dokumen perancangan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi *Whistleblowing System* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi dari laporan dan Praktek Kerja Lapangan serta saran yang disampaikan penulis dan perusahaan yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sumber-sumber literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan ini.

### **LAMPIRAN**

Pada bagian ini berisi tentang dokumentasi kegiatan saat pengerjaan kegiatan secara online maupun offline.